

## REKONSTRUKSI LAPORAN KEUANGAN SESUAI SAK EMKM PADA BUMDES BERSAMA BANYU MANDIRI KABUPATEN SITUBONDO

Abdul Aziz Rahmatullah<sup>1</sup>, Diyah Probowulan<sup>2</sup>, Ahmad Syahfrudin Zulkarnaeni<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember

[abdulaziznim056@gmail.com](mailto:abdulaziznim056@gmail.com),

[diyahprobowulan@unmuhjember.ac.id](mailto:diyahprobowulan@unmuhjember.ac.id), [syahfrudin@unmuhjember.ac.id](mailto:syahfrudin@unmuhjember.ac.id)

### ABSTRAK

Laporan keuangan BUMDes Banyu Mandiri memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan kinerja keuangan BUMDes selama periode tertentu. Didirikan pada tahun 2012, BUMDes Banyu Mandiri fokus pada pemberdayaan perekonomian masyarakat dengan memberikan layanan perkreditan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes Banyu Mandiri. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi pencatatan keuangan saat ini dan proses penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan pada BUMDes Banyu Mandiri masih sangat sederhana dan hanya menggunakan catatan tercatat untuk mencatat penerimaan kas dari setoran pokok, pendapatan jasa, serta pengeluaran kas dari perputaran Simpan Pinjam Wanita (SPP) dan pengeluaran lainnya. Dalam penelitian ini penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi, penjurnalan, buku besar, neraca saldo, hingga pembuatan laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

**Kata Kunci :** SAK EMKM, penyusunan laporan keuangan

### ABSTRACT

The financial report of BUMDes Banyu Mandiri provides a comprehensive picture of the financial condition and financial performance of BUMDes during a certain period. Founded in 2012, BUMDes Banyu Mandiri focuses on empowering the community's economy by providing loan services. This research aims to analyze the application of Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities (SAK EMKM) in preparing the financial reports of BUMDes Banyu Mandiri. The method used is qualitative with a descriptive approach to illustrate the current condition of financial recording and the process of preparing financial reports in accordance with SAK EMKM. The research results show that financial recording at BUMDes Banyu Mandiri is still very simple and only uses recorded notes to record cash receipts from principal deposits, service income, as well as cash expenditures from Women's Savings and Loans (SPP) rollovers and other expenses. In this research, the preparation of financial reports based on SAK EMKM starts from collecting evidence of transactions, journalizing, ledger books, trial balances, to making financial reports such as financial position reports, profit and loss reports, and notes to financial reports.

**Keywords :** SAK EMKM, preparation of financial reports

### Article History

Received: Juli 2024

Reviewed: Juli 2024

Published: Juli 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musyitari.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Musytari**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Organisasi Ekonomi Pedesaan memainkan peran penting dalam memperkuat ekonomi pedesaan, namun masih sering menjadi titik lemah. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memajukan organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa dan mengembangkan jaringan ekonomi guna meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dan telah terbukti memberikan keuntungan serta menambah pendapatan desa di beberapa wilayah. BUMDes adalah institusi ekonomi di tingkat desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Muhammad, 2021) Berdirinya BUMDes dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa" (Alfurkaniati, 2017)

Dalam menyusun laporan keuangan, BUMDes harus memperhatikan standar akuntansi keuangan yang berlaku agar laporan tersebut mudah dipahami. Sebagian besar kegiatan BUMDes mirip dengan kegiatan UMKM pada umumnya, sehingga penyusunan laporan keuangan harus mengikuti pedoman umum. Dalam hal ini, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2018, harus digunakan. SAK EMKM diterbitkan untuk diterapkan pada entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Secara umum, UMKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik karena biasanya tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (SAK EMKM I. A., 2016)

Berdasarkan data dari Kementerian Desa PDTT (Masterplandes, 2023), hanya ada 12.945 BUMDesa yang telah memiliki status badan hukum. Sementara itu, sekitar 35.000 BUMDes masih dalam proses pendaftaran. Oleh karena itu, masih ada sekitar 42 persen desa yang belum memiliki BUMDesa. Perkembangan BUMDes di Indonesia di dorong oleh banyaknya masyarakatnya sendiri, terutama di provinsi Jawa Timur sedikit BUMDes yang berstatus maju. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil E. Dardak, menyatakan bahwa dari 6.100 badan usaha milik desa (BUMDes) di Jawa Timur, hanya 537 atau 12 persen yang berstatus maju Tidak bisa dipungkiri, pengembangan BUMDes masih menghadapi banyak tantangan. Akibatnya, beberapa BUMDes yang telah didirikan mengalami mati suri. Penelitian yang dilakukan oleh (Istihara Amin Hiji, 2018) di BUMDes Rempak Lanjing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, menemukan beberapa hambatan, antara lain:

- a. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pengelola penyusunan keuangan yang masih rendah.
- b. Komunikasi yang tidak efektif dan arus informasi yang terbatas di kalangan elit desa
- c. Perbedaan pemahaman mengenai aturan terkait BUMDes.
- d. Rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat

Potensi tersebut menjadi peluang munculnya BUMDes hampir di seluruh desa di Kabupaten Situbondo. dilansir pada (BUMDesa Situbondo, 2022) berdasarkan data BUMDes tahun 2022 jumlah BUMDes yang ada mencapai 101 BUMDes dari 132 desa di Kabupaten Situbondo. Sebanyak 6 BUMDes sedang dalam proses pendaftaran badan hukum, sementara 26 BUMDes lainnya sedang dalam proses verifikasi dokumen. Secara keseluruhan, ada 70 BUMDes yang sedang menuju status badan hukum, yang merupakan 69 persen dari total 101 BUMDes yang ada di Kabupaten Situbondo. Salah satunya BUMDes yang berdiri di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo yakni BUMDes Banyu Mandiri. BUMDes yang masih berstatus aktif dan berbadan hukum di bentuk oleh 7 desa di Kecamatan banyuglugur, BUMDes telah berdiri sejak lama pada Tahun 2012. BUMDes Banyu Mandiri menjalankan usaha unit simpan pinjam yang di modalkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah serta di kelola oleh Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) dalam menjalankan BUMDes di Kecamatan Banyuglugur, dalam pelaksanaannya, pengurus BUMDes sering kali melakukan pencatatan keuangan pemasukan dan

pengeluaran kas dan menjadikannya transaksi namun tidak ada penjurnalan, kendala laporan keuangan BUMDes Banyu Mandiri sempat di pertanyakan oleh pihak yang berkepentingan namun, Banyu Mandiri juga tidak mengetahui apakah laporan keuangan yang mereka susun sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Hal ini terjadi di karenakan kurangnya pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar tertentu.

Pengelolaan catatan keuangan dapat memakan waktu dan tenaga jika dilakukan secara manual dan memerlukan dokumentasi yang cermat. Selain itu, risiko kesalahan pencatatan keuangan sangat tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan SAK EMKM untuk mempermudah pengelolaan pencatatan keuangan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terlaksana dengan baik jika dalam penyusunan laporan keuangan berlandaskan dengan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga dari semua pihak dengan pedoman standar keuangan yaitu SAK EMKM yang sesuai standar dan sesuai diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahan dana yang diterima oleh BUMDes yang dapat merugikan desa dalam keadaan demikian, serta mencegah dana BUMDes disalah gunakan untuk memberikan manfaat bagi desa itu sendiri. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperbaiki laporan keuangan BUMDes Bersama Banyu Mandiri sesuai SAK EMKM. Maka penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM Pada BUMDes Bersama Banyu Mandiri Kabupaten Situbondo"

## KAJIAN TEORI

### Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang bercirikan desa yang didirikan secara gotong royong oleh pemerintah desa dan masyarakat desa, menurut Buku Petunjuk (Pedoman Teknis Pendirian BUMDes Bersama, 2020). BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan seluruh potensi perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di tetapkan pada Pasal 87 ayat 1 UU Desa. Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa, yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Secara umum BUMDes Bersama diartikan sebagai Badan Usaha Milik Desa yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu desa. BUMDes Bersama merupakan wadah atau badan usaha yang beroperasi bersama dengan dua desa atau lebih. BUMDes Bersama Banyu Mandiri yang merupakan hasil kerjasama tujuh desa ini terletak di Kecamatan Banyuglugur.

Menurut (BPK RI, 2014) dalam UU Desa No. 6/2014, tersedia opsi layanan komersial antar Desa, pelayanan usaha antar Desa, dapat dibentuk BUMDes milik dua (2) Desa atau lebih di tetapkan pada Pasal 92 ayat 6 UU Desa. Pasal 141 PP No. 43/2014, sebagai aturan pelaksanaan UU Desa No. 6/2014, melahirkan istilah hukum BUMDes Bersama. Mengingat dalam peraturan desa disebutkan bahwa tujuan didirikannya BUMDes Bersama adalah untuk memfasilitasi perdagangan antar desa, maka dimungkinkan untuk mendirikan organisasi tersebut secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini ada 7 desa yang sepekat untuk melakukan kerja sama dalam mengelola potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui BUMDes Bersama, maka kemudian mendirikan BUMDes Bersama dengan nama BUMDes Bersama Banyu Mandiri. Terdapat empat tujuan dalam pembentukan pengelola kegiatan BUMDes Bersama, antara lain : a Pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. b Menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar desa dan tata kelola BUMDes Bersama yang transparan dan akuntabel. c. Memberi dasar kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemerintah desa untuk melakukan kerja sama antar desa dalam bentuk BUMDes Bersama. d. Rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan

## dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUMDes Bersama. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) adalah entitas yang tidak memiliki tanggung jawab akuntabilitas publik yang besar dan sesuai dengan definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan syarat telah memenuhi kriteria tersebut setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Tidak mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pedoman yang digunakan oleh berbagai pihak untuk menyusun laporan keuangan yang dapat diterima secara umum. Standar ini mencakup berbagai konvensi, prosedur, dan peraturan yang disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada waktu tertentu. Standar akuntansi memberikan penjelasan mengenai transaksi, termasuk apa yang harus dicatat, bagaimana cara mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang disajikan.

Untuk memberikan panduan akuntansi keuangan dan memudahkan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menyusun laporan keuangan dan memberikan informasi akuntansi yang tepat, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada tanggal 24 Oktober 2016, yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Penerbitan SAK EMKM ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM di Indonesia dalam mengimplementasikan laporan keuangan, sehingga mempermudah mereka dalam memperoleh pendanaan dari berbagai lembaga keuangan (SAK EMKM, Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016). Dengan demikian, setiap laporan keuangan yang disusun oleh pelaku BUMDes harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku agar mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian dengan cara melaksanakan analisis lalu juga dengan menginterpretasi teks beserta hasil wawancara dengan harapan bisa mendapatkan arti dari sebuah fenomena. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata maupun tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut teori ini, pendekatan diarahkan terhadap latar dan individu tersebut secara holistic. Dalam penelitian kali ini akan dilakukan Pada BUMDes Bersama Banyu Mandiri di desa Kalianget, Kec. Banyuglugur, Kab. Situbondo, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena program Badan Usaha Milik Desa Bersama yang terlibat berada pada lingkungan wilayah tersebut, sehingga mempermudah dalam penelitian. Dilakukan pada bulan Mei 2023 – selesai, dalam melakukan kunjungan lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Aktifitas Operasional yang dilakukan pada BUMDes Banyu Mandiri a Aktivitas Pembukuan Aktivitas pembukuan pada BUMDes Banyu Mandiri . Berikut adalah beberapa aktivitas utama dalam pembukuan : Pengumpulan Data Transaksi Mengumpulkan semua bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, nota, dan bukti lainnya serta mencatat semua penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas harian. Pencatatan Transaksi Memasukkan semua transaksi harian ke dalam pembukuan 1 bulan. b Aktivitas pemberian persetujuan dan penyaluran pinjaman Aktivitas pemberian persetujuan dan penyaluran pinjaman pada BUMDes Banyu Mandiri melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berikut adalah tahapan-tahapan yang ada di BUMDes Banyu Mandiri : pengajuan permohonan peminjaman, analisis kredit, keputusan pinjaman, pembuatan kontak pinjaman, penyaluran dana, monitoring pengawasan, evaluasi dan laporan. c Aktifitas Sumber Daya Manusia Aktivitas sumber daya manusia (SDM) pada BUMDes mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengelola,

mengembangkan, dan memotivasi karyawan agar mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. BUMDes Banyu Mandiri dalam usahanya memperkerjakan 4 karyawan dengan pembagian tugas masing-masing yang telah di tentukan Laporan Keuangan BUMDes Banyu Mandiri Sebelum Rekontruksi Berdasarkan SAK EMKM Laporan keuangan BUMDes Banyu Mandiri menunjukkan beberapa akun penting seperti kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. Dari wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa meskipun BUMDes Banyu Mandiri telah beroperasi selama lebih dari lima tahun, laporan keuangan yang dibuat masih sederhana karena keterbatasan dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia yang kurang memadai Pencatatan laporan keuangan masih dilakukan secara manual dan sederhana, serta belum memenuhi standar SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah). Berdasarkan SAK EMKM, laporan keuangan seharusnya mencakup tiga laporan utama yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan secara lengkap. Namun, BUMDes Banyu Mandiri hanya melakukan pencatatan mengenai pinjaman yang diberikan dan pendapatan dari pengembalian pinjaman. Berikut merupakan hasil analisis laporan keuangan yang ada di BUMDes Banyu Mandiri :

a Kas dan setara kas Kas dan setara kas adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian. Dalam unit pinjaman BUMDes Banyu Mandiri, pengelolaan kas dan setara kas mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan kelancaran operasional dan keamanan dana. Penyimpanan kas pada BUMDes Banyu Mandiri di kelompokkan menjadi 2, antara lain : kas uang tunai dan kas di bank b Persediaan BUMDes Banyu Mandiri tidak ada pencatatan persediaan yang spesifik. Sama seperti dalam akuntansi persediaan di catat berdasarkan transaksi terjadi, pengakuan dan pengukuran persediaan hanya mencakup beberapa peralatan kantor saja pada BUMDes Banyu Mandiri c Aset tetap BUMDes Banyu Mandiri tidak mengakui aset seperti tanah, peralatan dan mobil. Hanya saja perolehan awal aset yang di ketahui oleh BUMDes Banyu Mandiri. Di BUMDes Banyu Mandiri, penyusutan belum pernah diterapkan pada aset tetap yang dimiliki, hal ini mungkin disebabkan oleh asumsi bahwa aset tersebut di gunakan dalam jangka waktu yang singkat (kurang lebih satu tahun) atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya penyusutan dalam laporan keuangan. d Pendapatan pengembalian pinjaman BUMDes Banyu Mandiri mengakui pendapatan pengembalian pinjaman sebagai kas, yang di mana terdiri dari dua komponen yaitu pokok pinjaman dan bunga. Bagian pokok mengurai saldo pinjaman, sementara bagian bunga diakui sebagai pendapatan. e Hutang Pengakuan hutang dalam BUMDes Banyu Mandiri melibatkan pencatatan kewajiban yang timbul dari kegiatan pinjaman yang di lakukan oleh BUMDes. Hutang ini bisa berupa pinjaman yang diperoleh dari pihak eksternal atau kewajiban kepada anggota atau pihak lain yang memberikan dana kepada BUMDes. f Beban Pengakuan beban dalam BUMDes Banyu Mandiri merupakan proses pencatatan semua biaya yang timbul dari operasional unit pinjaman. Beban ini meliputi berbagai jenis biaya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan pinjaman, seperti biaya bunga, biaya administrasi, gaji tunjangan karyawan dan biaya operasional Hasil Analisis Data Laporan Keuangan BUMDes Banyu Mandiri Sebelum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi untuk entitas mikro, kecil, dan menengah, penulis terlebih dahulu menganalisis laporan keuangan BUMDes Banyu Mandiri. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut :

a Penelitian ini dilakukan di Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Data transaksi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait operasi keuangan BUMDes Banyu Mandiri. Langkah awal yang diambil oleh peneliti adalah mengumpulkan semua data yang dimiliki oleh BUMDes Banyu Mandiri sebagai bahan penelitian. Nama akun yang akan digunakan dalam laporan keuangan disusun berdasarkan data transaksi sebelumnya. b Dalam mengidentifikasi aktivitas keuangan BUMDes Banyu Mandiri, penulis fokus pada analisis detail transaksi harian, pemetaan arus kas masuk dan keluar, serta evaluasi kinerja keuangan melalui laporan berkala. Aktivitas ini mencakup pencatatan pendapatan serta pengeluaran yang berkaitan dengan layanan simpan pinjam. Sebelum menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku, yaitu

SAK EMKM, peneliti terlebih dahulu menganalisis dan mengidentifikasi aktivitas keuangan yang telah dilakukan oleh BUMDes Banyu Mandiri dalam satu periode. c Sebelum merekonstruksi laporan keuangan BUMDes Banyu Mandiri agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), perlu dilakukan proses akuntansi terlebih dahulu. Proses akuntansi ini meliputi langkah-langkah berikut : membuat jurnal, buku besar, laba rugi dan neraca saldo d Penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM Setelah menyelesaikan semua tahap proses akuntansi, peneliti kemudian menyusun laporan keuangan lengkap untuk BUMDes Banyu Mandiri sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Laporan keuangan lengkap sesuai SAK EMKM mencakup tiga bagian utama, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan.

## **Pembahasan**

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk menggambarkan kondisi usaha, apakah terjadi kemajuan atau kemunduran. Laporan ini sangat dibutuhkan oleh setiap aktivitas usaha untuk menilai kinerja dan kesehatan finansial secara akurat. Menurut (Sadeli, 2018), laporan keuangan adalah laporan tertulis yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan adalah dokumen tertulis yang menyediakan informasi tentang posisi keuangan suatu entitas serta perubahan yang terjadi dalam periode tertentu. Ini mencakup hasil yang dicapai selama periode tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian integral dari siklus akuntansi, yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi, dan diakhiri dengan penyusunan ringkasan dan pelaporan hasil transaksi tersebut. (Mortigor Afrizal Purba, 2019) Dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan maupun referensi dalam penelitian terkait rancangan penerapan SAK EMKM pada BUMDes Banyu Mandiri, sebagian besar BUMDes tidak memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar yang berlaku, yaitu SAK EMKM. kebanyakan BUMDes belum memiliki kesadaran atau kapasitas yang memadai dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Menurut (Nur Hidayati, 2023) dalam penelitian mereka yang berjudul "Rekontruksi penyusunan laporan Keuangan BUMDes berbasis SAK EMKM menggunakan excel for Accounting" menemukan bahwa banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Malang masih menghadapi tantangan signifikan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

Studi ini mengungkapkan bahwa mayoritas BUMDes di wilayah tersebut hanya menyusun laporan keuangan berdasarkan arus kas masuk dan keluar tanpa menyusun laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi secara terperinci. Keterbatasan ini mengakibatkan laporan keuangan mereka tidak memenuhi standar SAK EMKM, yang sebenarnya menuntut penyajian laporan keuangan yang lebih komprehensif dan akurat. Standar ini mengharuskan penyusunan laporan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, yang memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan entitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Banyu Mandiri, belum sepenuhnya mengadopsi dan mengimplementasikan SAK EMKM dalam pelaporan keuangan mereka. Banyak BUMDes yang masih terbatas pada pencatatan transaksi keuangan dasar, seperti penerimaan dan pengeluaran kas, tanpa melakukan penyusunan laporan yang lebih mendalam.

## **Rekontruksi Laporan Keuangan BUMDes Banyu Mandiri Berbasis SAK EMKM**

Dalam menjalankan transaksi keuangannya, BUMDes Banyu Mandiri hanya mencatat transaksi kas masuk seperti setoran pokok dan jasa, serta pengeluaran kas untuk pengkuliran SPP. Namun, untuk memenuhi standar akuntansi yang berlaku, seperti yang tercantum dalam laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, dan catatan atas laporan keuangan, diperlukan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan BUMDes Banyu Mandiri bertujuan untuk mengidentifikasi potensi implementasi penyusunan laporan keuangan sesuai standar ini. Selain itu, penerapan SAK

EMKM juga membantu memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan BUMDes, seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban.

Secara khusus, dalam proses penyusunan laporan keuangan, BUMDes Banyu Mandiri harus mempertimbangkan pencatatan yang lebih komprehensif dan terperinci. Misalnya, laporan posisi keuangan harus mencakup semua aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dipenuhi, dan ekuitas yang ada. Laporan laba/rugi harus mencatat semua pendapatan dan beban yang terjadi selama periode pelaporan. Sementara itu, catatan atas laporan keuangan harus memberikan penjelasan rinci mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi tambahan yang relevan dengan laporan keuangan. Selain itu, meskipun BUMDes Banyu Mandiri saat ini tidak mencatat adanya persediaan, penerapan SAK EMKM dapat membantu dalam pencatatan dan pengukuran persediaan jika suatu saat persediaan menjadi bagian dari operasi BUMDes. Dengan penerapan standar ini, BUMDes Banyu Mandiri dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya, sehingga laporan tersebut dapat diandalkan oleh pihak internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan.

### **Laporan Posisi Keuangan**

Laporan posisi keuangan menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal pelaporan. Laporan ini dianggap seimbang jika total aset sama dengan total modal. Akun-akun yang umumnya termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas (SAK EMKM, 2016). BUMDes Banyu Mandiri hingga saat ini belum menyusun laporan posisi keuangan yang memadai. Hal ini terutama disebabkan oleh kebingungan pihak BUMDes mengenai cara penyusunan laporan pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ketidakpastian ini membuat mereka belum mampu menghasilkan laporan yang memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Selain itu, pemilik BUMDes lebih memilih untuk membuat laporan pembukuan yang sederhana dan mudah dipahami oleh mereka sendiri.

Laporan ini mungkin mencakup elemen dasar seperti kas masuk dan kas keluar, namun tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar akuntansi yang lebih kompleks. Pemilik merasa lebih nyaman dengan format yang mereka pahami, meskipun ini berarti laporan tersebut tidak sekomprehensif yang diharapkan oleh standar akuntansi resmi. Pemilik BUMDes cenderung fokus pada pencatatan transaksi harian yang mereka anggap penting untuk operasi sehari-hari, seperti setoran pokok, jasa, dan pengeluaran kas untuk pengkuliran SPP. Mereka belum terbiasa dengan konsep-konsep yang lebih rumit seperti pengakuan aset tetap, kewajiban jangka panjang, atau ekuitas, yang merupakan bagian integral dari laporan posisi keuangan yang sesuai dengan standar

### **Laporan Laba Rugi**

Laporan laba rugi menyajikan seluruh penghasilan dan beban yang diakui selama periode tertentu. Pengecualian terjadi apabila Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) mengatur perlakuan dampak dari koreksi kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi, yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif untuk periode sebelumnya dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi pada periode perubahan tersebut terjadi (SAK EMKM, 2016). Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi mencakup akun pendapatan dan beban keuangan (SAK EMKM, 2016). BUMDes Banyu Mandiri saat ini belum menyusun laporan laba rugi sesuai standar yang diharapkan.

Proses perhitungan laba rugi yang dilakukan BUMDes Banyu Mandiri didasarkan pada pencatatan penerimaan kas dikurangi pengkuliran SPP dan beberapa beban lainnya. Namun, perhitungan ini belum memperlihatkan akurasi yang memadai karena beberapa faktor kunci belum dimasukkan, seperti biaya penyusutan. Biaya penyusutan merupakan komponen penting yang seharusnya dicatat dalam laporan laba rugi. Penyusutan merupakan pengakuan atas pengurangan nilai aset tetap selama masa pakainya, yang mempengaruhi penghitungan laba

bersih. Tanpa mencatat biaya penyusutan, laporan laba rugi tidak akan mencerminkan dengan akurat pengeluaran yang sebenarnya terjadi dalam operasional BUMDes Banyu Mandiri.

### **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tambahan dan rincian yang bervariasi tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Di dalamnya mencakup penjelasan mengenai laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), kebijakan akuntansi yang digunakan, serta detail dari akun-akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting. Informasi tambahan dan rincian yang disajikan dapat berupa penjelasan tentang sifat transaksi, aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang relevan dengan operasi entitas. Catatan atas laporan keuangan disusun dengan sistematis dan terstruktur, dimana setiap akun dalam laporan keuangan dijelaskan lebih lanjut dalam catatan tersebut. Hal ini memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan dengan baik

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang rekonstruksi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada BUMDes Banyu Mandiri Situbondo, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan di BUMDes Banyu Mandiri masih tergolong sederhana dan belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pencatatan keuangan yang dilakukan hanya mencakup transaksi-transaksi harian, seperti penerimaan kas dari setoran pokok, pendapatan setoran jasa, serta pengeluaran kas untuk penggulingan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan pembelian beban lainnya. Laporan keuangan yang dihasilkan belum menyajikan informasi yang komprehensif dan detail mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban BUMDes.

BUMDes Banyu Mandiri telah menyusun laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Proses penyusunan ini dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi dan data terkait, diikuti dengan penjurnalan, pembukuan dalam buku besar, pembuatan neraca saldo, dan akhirnya penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi keuangan BUMDes Banyu Mandiri dan menyatakan bahwa sejak Januari 2023, penyusunan laporan keuangan BUMDes ini telah mengikuti standar yang berlaku, yaitu SAK EMKM. Pihak BUMDes Banyu Mandiri menyadari pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar untuk keberlangsungan usaha mereka. Namun, mereka juga mengakui bahwa pemahaman mengenai cara mencatat dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM masih perlu ditingkatkan. Dalam upaya meningkatkan pemahaman ini, BUMDes Banyu Mandiri berkomitmen untuk terus belajar dan memperbaiki sistem pencatatan keuangan mereka. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes

### **Daftar Referensi**

- Aji Safah Indah Sabrina. (2023). Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan Toko Surya Anugrah Di Tenggarong. *Jurnal Ilmiah*.
- Alfurkaniati. (2017). *Pengantar Akuntansi I*. CV Madenatera.
- Arikunto S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Banyu Mandiri. (2018). *Sejarah PNPM*. PNPM Banyu Mandiri.
- Bumdes Banyu Mandiri. (2023). *Wawancara Tempat Penelitian Bumdes Banyu Mandiri*. Situbondo, Jawa Timur: Peneliti.
- Fahmi Irham. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan*. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Diambil Kembali Dari <https://eprints.ums.ac.id/41136/13>

- Istihara Amin Hijji. (2018). PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (Bumdes) LAJING KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM). Digital Repository Universitas Jember.
- Kapantow, E. S. (2023). Penerapan Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Persyaratan Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 Pada Dinas Parawisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(02) 494-505.
- Lexy J. Moleong. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mortigor Afrizal Purba. (2019). ANALISIS PENERAPAN SAK EMKM PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM DI KOTA BATAM. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, 55-63.
- Muhammad Fathul Wahid Yusri. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Bumdes ALBarokah Perian Kecamatan Montong Gading. *Jurnal Ilmiah*.
- Muhammad, I. (2021). Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Bumdesa. Diambil Kembali Darirepository.Unmul.Ac.Id.:[https://Repository.Unmul.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/8904/Laporan Bumdesa Karya Mandiri - Muhammad Iqbal.Pdf?Sequence=1](https://Repository.Unmul.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/8904/Laporan%20Bumdesa%20Karya%20Mandiri%20-%20Muhammad%20Iqbal.Pdf?Sequence=1)
- Nur Hidayati. (2023). Rekontruksi Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes Berbasis SAK EMKM Menggunakan Excel For Accounting. *Jurnal Ilmiah*.
- Nur Hidayati. (2024). Rekontruksi Penyusunan Bumdes Berbasis SAK EMKM Menggunakan Excel For Accounting. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 37- 58. Pedoman Teknis Pendirian Bumdes Bersama. (2020). Bumdes Bersama. Jakarta : Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementrian Desa.
- Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 11. (2021). Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Pusat: PP Nomor 11 Tahun 2021
- Rizki Fatah Maulana. (2023). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM Toko Grosir Hasanah. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, (3), 36 - 48.
- Sadeli. (2018). Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus Rumah Sakit Elim Rantepao). *UNITOMO*, 18-19. SAK EMKM. (2016). Laporan UMKM Berdasarkan SAK EMKM. UNIVERSITAS PEJUANG REPUBLIK INDONESIA. SAK EMKM. (2016). Penerapan Akuntansi SAK EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Online Journal Unja*. Diambil Kembali Dari <https://OnlineJournal.Unja.Ac.Id/Pdppd/Article/DownlOad/12527/10854>
- SAK EMKM. (2016). Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- SAK EMKM. (2016). Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Berdasarkan SAK EMKM. IBI Kesatuan. Diambil Kembali Dari <https://Jurnal.Ibik.Ac.Id/Index.Php/JabkEs/Article/Download/1342/1133/5997>
- SAK EMKM, I. A. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- SAK EMKM, Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). IAI Siapkan Standar Akuntansi Agar EMKM Capai Literasi Keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia. Diambil Kembali Dari <http://IaiGlobal.Or.Id/V03/BeritaKegiatan/Detailberita-917=PressRelease-Iai-Siapkan-Standar-AkuntansiAgar-Emkm-Capai-Literasi-Kuangan>
- Sitomo, S. (2018, Januari 10). Dasar Metodologi Penelitian. *Metode Penelitian* .
- Sri Wahyuni. (2020). Analsis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Taiba Smart Desa Tarai Bangun. *Jurnal Ilmiah*.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian. *Repository Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 131.
- Unit Pengelolaan Keuangan . (2023). Laporan Keuangan Bumdes Banyu Mandiri. Situbondo, Jawa Timur: Bumdes Banyu Mandiri.

Widiani Ramadhayanti. (2022). Analisis Penerapan SAK EMKM Dalam Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara . Jurnal FEB Unmul